



Judul : Piring makan MBG, hasil pengujian BPOM ditunggu
Tanggal : Rabu, 10 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Piring Makan MBG

Hasil Pengujian BPOM Ditunggu

WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera mengumumkan hasil pengujian bahan wadah makanan atau ompreng dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ompreng ini disebut tidak halal karena mengandung minyak babi dan meresahkan masyarakat.

Setelah mencuat beberapa pekan terakhir, BPOM lalu menguji bahan ompreng yang disebut diimpor dari China itu.

Hidayat mendorong penyelesaian pengujian secepat mungkin. Jangan sampai dalam program prioritas ini justru muncul masalah, apalagi yang fundamental terkait status kehalalannya.

"Jika rawan masalah, bahkan tidak halal, dikhawatirkan berdampak negatif pada anak-anak generasi penerus bangsa," kata Hidayat di Jakarta, kemarin.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengapresiasi Komisi IX DPR yang mendorong BPOM melakukan pengujian ompreng tersebut. Selain itu, dia juga menyambut

positif langkah BPOM yang meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menahan penggunaan produk ompreng yang sedang diuji hingga pengujian selesai.

"Maka agar masalah ini segera selesai, BPOM mestinya menyegerakan kajiannya dan mengumumkan hasilnya

ke publik," ingatnya.

Lebih lanjut, Presiden PKS periode 2000-2004 itu meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ikut turun tangan. Dalam konteks kehalalan, UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), menegaskan BPJPH berwenang pengawasan produk yang dikonsumsi warga Indonesia.

"Pasal 18 Undang-Undang itu menyebut, di antara yang diharamkan adalah produk berbahan babi," terangnya.

Berikutnya, jika pengujian BPOM menemukan ompreng MBG memang mengandung minyak babi, produk itu wajib dicantumkan keterangan "tidak halal", sesuai Pasal 26 ayat (2) UU JPH.

Dengan status non-halal, ompreng itu tidak boleh digunakan untuk siswa Muslim. Bahkan, penggunaan sebaiknya dihentikan dan diganti dengan produk halal.

Saat ini, ada banyak pilihan produk yang menggunakan bahan halal, dan juga mudah ditemukan.

Dengan demikian, selain memenuhi hak asasi konsumen, keresahan masyarakat juga terjawab, dan kepercayaan publik tetap terjaga.

"Pada akhirnya, program Presiden Prabowo Subianto yang bermanfaat bagi rakyat tidak terganggu," katanya. ■ **PVB**